RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80
	Kawasan Permukiman	Presentase pengurangan Kawasan Kumuh	89,36
	Penataan dan Peningkatan Kulaitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumer
	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumer
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporar
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporar
	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86,24
	Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatar
	Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pernerintah yang tertangani	100%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena reloksi program pemerintah	4 unit
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beseria PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unii
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumer
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumer
2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	85%
	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumer
	Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	1 dokumen
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumer
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis
İ			
:	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis
			1 jenis 4 kal
	Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	lingkungan hidup yang dilakukan Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	
	Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	lingkungan hidup yang dilakukan Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 kai 4,23%
	Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	lingkungan hidup yang dilakukan Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Persentase luas RTH Publik	4 kai 4,23%
	Kabupaten/Kota Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	lingkungan hidup yang dilakukan Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Persentase luas RTH Publik Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola	4 kal 4,23% 2 kecamatar

2 ka	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	Designation Control Statute DO
1 Lapora		Penyimpanan sementara Limbah B3
т царога	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
2	Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina / diverifikasi lapangan	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 dokume	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
55	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap tzin Lingkungan dan tzin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
100	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
30 lapora	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
50	Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH (pendataan, pendampingan)	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
1 dokum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
1 dokum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
100	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
3 jenis kegiat	Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3 kali pendampingar	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
16 kelompok masyarakat	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
1 kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
1 je	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
1 kelom;	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 kelomp	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
100	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	Hidun Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
5 dokum	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
5 dokum	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
5 dokum	Jumlah Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
9	Persentase pengelolaan sampah	Pengelolaan Persampahan
8	Persentase pengelolaan sampah	Pengelolaan Persampahan
7 bank samp	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
1 dokum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
22 sarpras (TPA alat berat, 11 t sampah,6 beto pic up sampal sarana lainn	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
15.000 - 20.0 ton/tal	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional
98,8	Persentase permukiman layak huni	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman

Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase permukiman layak huni	96,62%
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	120 unit
Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk Pecegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	120 Unit

Padang Panjang, 02 Januar 2024 Kepala Dinas Perumahan, Dan Lingkungan Hidap Kota Padang Panjang

DINAS CAUCAGO (ALVI, SENA, ST, MT)
DAN LA LINGAN (ALVI, SENA, ST, MT)
NIP. 19750815 200212 1 004

NG PANJAN